



MEKANISME PERSIAPAN PEMEKARAN DESA TUNAN TAKA DI KELURAHAN PETUNG KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

St. Rukaiyah¹, Mulyadi Hamid², Nurlinah³

^{1,2,3}Universitas Fajar - Makassar

Email : rukaiyah@unifa.ac.id

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis berbagai aspek terkait persiapan pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami strategi persiapan pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen untuk menganalisis langkah-langkah strategis, kendala yang dihadapi, penilaian kelayakan, dampak yang diharapkan, serta peran dinas terkait dan kebijakan pemerintah dalam mendukung pemekaran desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persiapan pemekaran Desa Tunan Taka melibatkan langkah-langkah strategis seperti pengajuan proposal, survei kelayakan, koordinasi dengan dinas terkait, dan keterlibatan masyarakat. Kendala utama dalam proses pemekaran meliputi masalah administratif, infrastruktur, dan koordinasi antar pihak. Desa Tunan Taka dinilai layak untuk dimekarkan berdasarkan potensi ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang ada. Pemekaran Desa Tunan Taka diharapkan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah dengan meningkatkan perhatian pemerintah terhadap layanan publik dan pengembangan ekonomi. Peran dinas terkait dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam mendukung proses pemekaran, di mana koordinasi dan dukungan kebijakan dapat memastikan proses pemekaran berjalan sesuai regulasi dan efektif.

Kata Kunci : *Strategi persiapan, Pemekaran Desa*

ABSTRACT. This study aims to identify and analyze various aspects related to the preparation for the expansion of Tunan Taka Village in Petung Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency. This study employs a descriptive qualitative approach to understand the preparation strategy for the expansion of Tunan Taka Village in Petung Village, Penajam District, Penajam Paser Utara Regency. Data is collected through interviews, observations, and document analysis to assess strategic steps, obstacles faced, feasibility assessment, expected impacts, and the role of relevant agencies and government policies in supporting village expansion.

The research results indicate that the preparation for the expansion of Tunan Taka Village involves strategic steps such as proposal submission, feasibility surveys, coordination with relevant agencies, and community involvement. Major obstacles in the expansion process include administrative issues, infrastructure, and inter-party coordination. Tunan Taka Village is considered feasible for expansion based on existing economic, social, and infrastructure potential. The expansion of Tunan Taka Village is expected to improve community welfare and accelerate regional development by increasing government attention to public services and economic development. The role of relevant agencies and government policies is crucial in supporting the expansion process, where coordination and policy support can ensure that the expansion process complies with regulations and is effective.

Keywords: *Preparation mechanism, Village expansion*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemekaran desa adalah proses administratif yang melibatkan pembagian wilayah administratif untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan layanan publik. Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemekaran wilayah administratif, termasuk desa, dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kriteria tertentu, seperti kepadatan penduduk, potensi ekonomi, dan kesiapan infrastruktur. Undang-undang ini menetapkan kerangka kerja umum dan kriteria untuk pemekaran.

Pemekaran desa diharapkan dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru, serta membantu dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Dengan persiapan yang matang dan dukungan semua pihak, pemekaran Desa Tunan Taka dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Pemekaran yang terjadi di Kelurahan Petung di Kecamatan Penajam membagi wilayah menjadi rencana dua bagian terpisah, yaitu Desa Tunan Taka dan Kelurahan Petung. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk memberikan manfaat yang lebih langsung dan menyeluruh dari program pemerintah daerah Kabupaten Penajam, khususnya di kelurahan Petung, pada semua lapisan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga mendapatkan layanan publik yang optimal. Pemekaran ini dipertimbangkan berdasarkan beberapa aspek, antara lain: 1. Kecamatan Penajam memiliki wilayah yang luas, yang mencapai 1.230,40 km² secara geografis, terdapat 4 desa dan 19 kelurahan di Kecamatan Penajam (BPS Kecamatan Penajam, 2021); 2. Tingkat kepadatan penduduk di Kelurahan Petung sangat tinggi, mencapai mencapai 9.251 jiwa dengan Kepadatan Penduduk sebesar 903.42 jiwa/km, sehingga memungkinkan pemekaran untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warga; 3. Sarana dan fasilitas pelayanan yang terpusat di kelurahan menyebabkan pelayanan yang diberikan kurang optimal. Banyak masyarakat yang tidak puas dengan pelayanan yang diterima karena prosesnya lambat dan banyak pekerjaan yang tertunda, disebabkan oleh kurangnya jumlah petugas pelayanan yang sesuai dengan jumlah penduduk yang banyak dilayani.

Penelitian ini mendesak karena pemekaran desa dianggap strategis untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan publik. Pemekaran desa merupakan salah satu strategi yang sering ditempuh dalam upaya meningkatkan efektivitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat di wilayah tertentu. Di Indonesia, pemekaran wilayah desa telah menjadi fenomena yang kerap terjadi, terutama di daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dan jumlah penduduk yang cukup besar. Salah satu daerah yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk pemekaran adalah Desa Tunan Taka, yang terletak di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan sehingga penelitian yang diteliti terkait dengan judul "Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara".

Rumusan Masalah

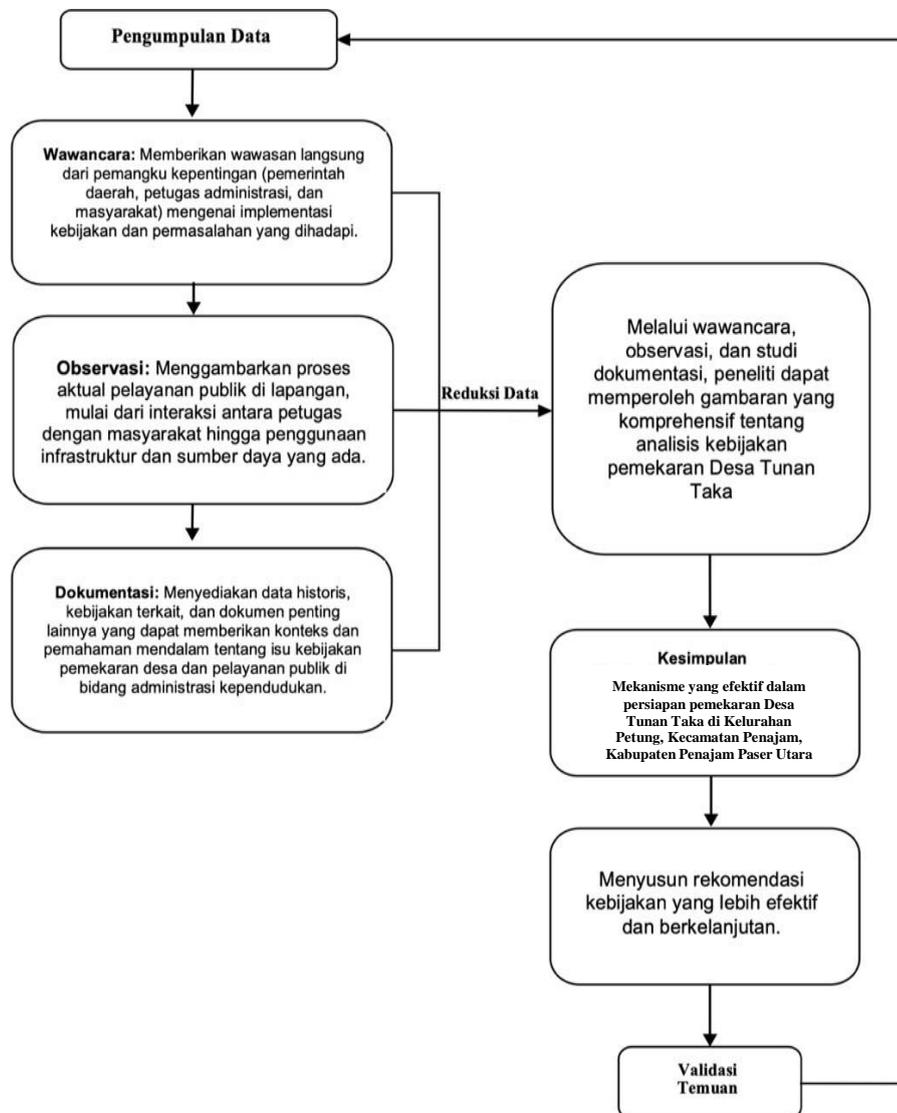
Berdasarkan latar belakang di atas maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah meneliti " **Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara**", dari uraian yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana mekanisme yang dilakukan

dalam Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara?”

KERANGKA FIKIR

Dengan fokus pada efektivitas pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Diharapkan hasil analisis kebijakan ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan tentang strategi yang tepat dalam mengimplementasikan pemekaran desa untuk meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya dalam bidang administrasi kependudukan, di Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang merupakan salah satu jenis penelitian dalam kategori kualitatif. Pilihan ini didasarkan pada kesesuaian dengan tujuan penelitian serta pertanyaan yang diajukan. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang sedang diteliti.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan pandangan para pemangku kepentingan terkait dengan "Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara". Melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, peneliti dapat merumuskan gambaran yang komprehensif tentang Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Adapun teknik pengumpulan data: Wawancara untuk mendapatkan data tentang efektivitas kebijakan pemekaran desa, Observasi digunakan untuk memahami secara langsung dinamika dan konteks yang terjadi di desa yang mengalami pemekaran, tetapi harus diperhatikan bahwa kehadiran peneliti dapat mempengaruhi hasil observasi, dan Dokumen adalah Untuk mengevaluasi Mekanisme Persiapan Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, teknik ini dapat digunakan untuk menganalisis dokumen kebijakan seperti undang-undang, peraturan, atau kebijakan organisasi untuk mengidentifikasi tujuan, strategi, dan implikasi kebijakan yang relevan. Dengan informan : 1. Pejabat atau staf pemerintah setempat yang terlibat perumusan kebijakan pemekaran desa dan administrasi kependudukan, 2. Tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang kebutuhan dan aspirasi masyarakat di Kelurahan Petung, 3. Anggota komunitas atau mahasiswa atau organisasi masyarakat yang aktif terlibat dalam urusan administrasi kependudukan atau pelayanan publik di Kelurahan Petung, 4. Warga masyarakat yang memiliki pengalaman dan pandangan terkait dengan pelayanan publik dan efektivitas administrasi kependudukan di Kelurahan Petung.

Menggunakan Teknik analisis data : Pengumpulan Data, Reduksi Data, Pengorganisasian Data, Penyajian Data, Interpretasi Data dan Penarikan Kesimpulan, dan juga melakukan pengecekan Pengecekan Validitas Temuan atau Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting untuk dilakukan guna memastikan validitas data yang diperoleh, sehingga tidak terjadi manipulasi atau rekayasa data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan (Bachri, 2010), Dengan Triangulasi Sumber Triangulasi sumber melibatkan perbandingan dan pengecekan kredibilitas informasi dari berbagai sumber yang berbeda. Data yang diperoleh dari wawancara dengan berbagai pihak terkait pemekaran desa dapat dibandingkan dengan hasil observasi langsung di lapangan. Selain itu, informasi yang diperoleh dari dokumen kebijakan dan literatur juga dapat digunakan sebagai sumber data tambahan untuk memvalidasi temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Umumnya, analisis ini menggunakan deskriptif kualitatif, adapun hasil wawancara informan terkait strategi persiapan pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara,

Hasil Wawancara dan observasi informan terkait Strategi persiapan pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam mengevaluasi strategi persiapan pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, adapun hasil penelitian berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis adalah, sebagai berikut:

- a.** Langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam persiapan pemekaran Desa Tunan Taka

Adapun hasil wawancara bersama informan penelitian berikut menyatakan bahwa langkah-langkah strategis yang telah dilakukan dalam persiapan pemekaran Desa Tunan Taka mencakup beberapa tahap kunci untuk memastikan kelancaran proses pemekaran dan keberhasilan implementasinya.

- b.** Kendala yang dihadapi dalam proses pemekaran Desa Tunan Taka dan cara mengatasinya

Kendala yang dihadapi dalam proses pemekaran Desa Tunan Taka mencakup berbagai tantangan yang mempengaruhi kelancaran proses tersebut. Kendala administratif meliputi masalah terkait pengaturan dan dokumentasi yang belum lengkap atau sesuai dengan regulasi yang berlaku.

- c.** Penilaian kelayakan Desa Tunan Taka untuk dimekarkan dari berbagai aspek

Penilaian kelayakan Desa Tunan Taka untuk dimekarkan melibatkan evaluasi menyeluruh dari berbagai aspek yang menentukan apakah pemekaran desa tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan memberikan manfaat yang optimal.

- d.** Peran Dinas terkait dan kebijakan pemerintah dalam mendukung proses pemekaran Desa Tunan Taka

Peran dinas terkait dan kebijakan pemerintah dalam mendukung proses pemekaran Desa Tunan Taka mencakup berbagai tanggung jawab dan tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah serta kebijakan yang diterapkan untuk memastikan keberhasilan pemekaran desa.

Kesimpulan dari deskripsi ini menunjukkan bahwa proses persiapan pemekaran Desa Tunan Taka telah melalui berbagai langkah strategis yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat, pemerintah daerah, dan dinas terkait. Kendala utama yang dihadapi, seperti masalah administratif, penyelesaian tapal batas, dan infrastruktur, telah diidentifikasi, dan upaya untuk mengatasinya sedang berlangsung melalui koordinasi yang lebih baik dan percepatan proses administrasi. Penilaian kelayakan menunjukkan bahwa Desa Tunan Taka memenuhi syarat untuk dimekarkan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, dan potensi ekonominya. Pemekaran diharapkan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, dengan dukungan kebijakan dan peran aktif dinas terkait yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemekaran tersebut.

Pembahasan

Menurut St. Rukaiya *et al.* (2023), strategi adalah mencakup penentuan tujuan jangka panjang, alokasi sumber daya, dan cara mengatasi tantangan eksternal. Konsep ini sangat relevan dalam konteks perencanaan strategis pemekaran desa, yang memerlukan perencanaan matang untuk menghadapi tantangan akibat perubahan administratif dan sosial-ekonomi. Dalam kasus Pemekaran Desa Tunan Taka di Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, strategi persiapan harus mencakup penetapan tujuan pengembangan desa,

identifikasi tantangan yang mungkin muncul, serta alokasi sumber daya yang diperlukan. Pendekatan strategis ini krusial untuk memastikan transisi yang efektif dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat.

Sehingga disimpulkan untuk langkah-langkah mekanisme dalam persiapan pemekaran Desa Tunan Taka dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur. Proses ini melibatkan pengajuan proposal, survei kelayakan, koordinasi dengan dinas terkait, dan keterlibatan masyarakat. Semua langkah ini sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan strategis yang menekankan pentingnya analisis situasi, penentuan tujuan, dan pengembangan rencana tindakan yang melibatkan semua pemangku kepentingan.

1. Kendala dalam Proses Pemekaran dan Cara Mengatasinya

Proses pemekaran Desa Tunan Taka tidak tanpa tantangan. Kendala utama yang dihadapi meliputi aspek administratif, infrastruktur, dan koordinasi antar pihak. Kendala administratif termasuk moratorium pemekaran yang diberlakukan oleh pemerintah, masalah penyelesaian tapal batas, dan penyesuaian dengan pembentukan Ibu Kota Negara (IKN). Moratorium dapat menyebabkan penundaan dalam proses pemekaran karena adanya regulasi baru atau perubahan kebijakan yang harus dipatuhi.

Sehingga disimpulkan untuk kendala utama dalam proses pemekaran meliputi aspek administratif, infrastruktur, dan koordinasi antar pihak. Mengatasi kendala ini memerlukan sosialisasi yang baik, koordinasi erat dengan dinas terkait, dan dukungan finansial serta teknis. Teori manajemen konflik menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kolaborasi untuk mencapai solusi yang efektif dan efisien.

2. Penilaian Kelayakan Desa Tunan Taka untuk Dimekarkan

Penilaian kelayakan Desa Tunan Taka menunjukkan bahwa desa ini memiliki potensi yang baik untuk dimekarkan. Aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur semuanya mendukung pemekaran. Jumlah penduduk yang melebihi batas minimal yang ditetapkan menunjukkan bahwa desa memiliki basis populasi yang memadai. Potensi ekonomi dari sektor pertanian dan perkebunan memberikan kontribusi positif terhadap kelayakan desa, karena sektor-sektor ini dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan sehingga disimpulkan untuk Desa Tunan Taka layak untuk dimekarkan berdasarkan penilaian aspek ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dukungan masyarakat dan kesiapan administratif juga mendukung kelayakan desa. Penilaian kelayakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan bahwa pemekaran memberikan manfaat yang optimal.

3. Dampak yang Diharapkan dari Pemekaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Daerah

Dampak yang diharapkan dari pemekaran Desa Tunan Taka mencakup peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Pemekaran diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pemekaran, pemerintah dapat lebih fokus pada kebutuhan lokal dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan juga diharapkan akan mempercepat, karena struktur administratif yang baru akan memungkinkan distribusi layanan yang lebih baik dan lebih dekat dengan masyarakat.

Sehingga disimpulkan bahwa Pemekaran Desa Tunan Taka diharapkan memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah. Pemekaran dapat meningkatkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan dan pelayanan publik, mempercepat akses masyarakat terhadap layanan pemerintahan, dan mendorong perkembangan ekonomi. Ini mencerminkan teori pembangunan daerah yang menekankan pentingnya pemekaran dalam meningkatkan efektivitas layanan publik dan infrastruktur.

4. Peran Dinas Terkait dan Kebijakan Pemerintah dalam Mendukung Proses Pemekaran

Peran dinas terkait dan kebijakan pemerintah sangat penting dalam mendukung proses pemekaran Desa Tunan Taka. Koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta dinas terkait lainnya diperlukan untuk memastikan bahwa semua persyaratan administratif dan teknis dipenuhi. Dinas terkait bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan teknis, melakukan verifikasi dokumen, dan memastikan bahwa proses pemekaran berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Sehingga Menyimpulkan bahwa Mekanisme pemekaran Desa Tunan Taka dilakukan dengan pendekatan yang terstruktur, mencakup pengajuan proposal, survei kelayakan, koordinasi dengan dinas terkait, dan keterlibatan masyarakat, semua selaras dengan prinsip perencanaan strategis untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan pemekaran desa.

KESIMPULAN

Mekanisme persiapan pemekaran Desa Tunan Taka adalah bahwa proses tersebut dilakukan melalui pendekatan yang terstruktur dan strategis, yang mencakup pengajuan proposal, survei kelayakan, koordinasi dengan dinas terkait, serta keterlibatan masyarakat. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa pemekaran desa dilaksanakan secara efektif, sesuai dengan kebutuhan lokal, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachri, S. Bachtiar. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* 10, no. 1 (2010) : 56.
- Badan Pusat Statistik Penajam Paser Utara. (2021). *Kecamatan Penajam Dalam Angka 2021*. ISSN 2723-214X.
- Bakri, M. (2017). Strategi Pembentukan Kecamatan Kubu Babussalam Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002-2011. *JOM FISIP*, 4(1), 1-10.
- Baron, R. A. (1990). *Conflict in Organizations*. In P. S. Goodman & Associates (Eds.), *Designing Effective Work Groups* (pp. 197-216). San Francisco: Jossey-Bass.
- Batita, R., Lengkong, F. D. J., & Tampongangoy, D. L. N. (2021). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Pelayanan Publik di Desa Gamsida Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, No. 111, Vol. VII. ISSN 2338 – 9613.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Non Profit Organizations* (5th ed.). John Wiley & Sons, New Jersey.
- Daly, John. (2012). *Human Resource Management in the Public Sector: Policies and Practices*. 1st Edition. New York: Routledge. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315703633>
- Desna Aromatica, D., & Sudrajat, A. R. (2021). *TEORI ORGANISASI: Konsep, Struktur & Aplikasi*. CV. Amerta Media. Diakses dari: <http://repo.unand.ac.id/49239/1/E-Book%2C%20E-Commerce%20%26%20Customer.pdf>
- Dwimawanti, I. H. (2004). *Kualitas Pelayanan Publik*. Vol. 1, No. 1, Januari 2004.
- Emis, Burhanuddin, Abdul Rahman. (2020). "Analisis Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu". *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 03, Nomor 09, halaman 479. ISSN 2623-2022.

- Fauzi, Akhmad dan Oktavianus, Alex. 2014. The Measurement of Sustainable Development in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Volume 15, Nomor 1, Juni 2014, hlm. 68-83.
- Fredrickson, H. G., & Waldo, D. (1997). *Public Administration and the Public Interest*. Publisher.
- Harfi, M. Zaini. 2016. "Politik Hukum Pembentukan Desa Menurut Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, vol. 4, no. 3, 2016, hal. 407.
- Hodge, B. J., & Anthony, W. R. (1988). *Organization Theory*. New York: Allyn and Bacon Inc.
- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini, F. (2016). Dampak Kebijakan Pemekaran Desa pada Aspek Pelayanan Publik di Desa Sadar Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara. Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar.
- Keiner, Marco. 2001. History, Definition(s) and Models of "Sustainable Development." ICSU, 2015. Review of Targets for the Sustainable Development Goals.
- Kuncoro Mudrajad. (2014). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Yogyakarta: Rajawali Pers.
- Littere, J. A. (1966). Conflict and Negotiation Processes in Organizations. *Administrative Science Quarterly*, 11, 16-32.
- Luthfy, Riza Multazam. (2021). "Politik Hukum Pengaturan Peraturan Desa Dalam Produk Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 18, no. 4, 2021, hal. 492.
- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STIM YKPN,
- McShane, S. L., & Von Glinow, M. A. (2010). *Organizational Behavior: Emerging Knowledge and Practice for the Real World*. 5th ed. New York: McGraw-Hill.
- Oktavia, S. (2023). Dampak Pemekaran Desa Terhadap Kualitas Pelayanan Publik: Studi pada Desa Suka Negeri Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
- Pertiwi, Nurlita. 2017. *Implementasi Sustainable Development di Indonesia*. Cetakan Pertama. Global Research and Consulting Institute (Global-RCI).
- Pratiwi, M. A. (2021). Perkembangan Teori Konflik Organisasi. *Jurnal Manajerial dan Bisnis Tanjungpinang*, 4(1), 51-65.
- Putri, P. K. (2022). Manajemen Konflik dan Resolusi Konflik: Sebuah Pendekatan Terhadap Perdamaian. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*, 2(1), 16-34. doi:10.31957/pjdir.v2i1.1945.
- Rachman, M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Tahta Media Group.
- Rahim, M. A. (2001). *Managing Conflict in Organizations*. 3rd ed. Westport, CT: Quorum Books.
- Rahim, M. A. (2002). Toward a Theory of Managing Organizational Conflict. *International Journal of Conflict Management*, 13(3), 206-235.
- Robbins, S. P. (1994). *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*. (J. Udaya, Alih Bahasa). Arcan.

- Robbins, S. P. (2000). *Organizational Behavior*. 9th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Sapara, L. A., & Eprilianto, D. F. (2024). Kajian Pemekaran Desa dalam Upaya Pemerataan Pembangunan (Studi Kasus di Desa Persiapan Ngandel Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo). *Publika*, 12(3), 727-738. Universitas Negeri Surabaya.
- Smith, K. (1966). *Conflicts in Organizational Behavior*. New York: McGraw-Hill.
- St Rukaiyah, Bahtiar, Mujahid, (2023). Strategi Manajemen Pelayanan terhadap Organisasi Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur. *Poma Jurnal: Publish of Management*, 1 (1).
- Sudarsana. (2015). Pemekaran desa sebagai upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik. *Spirit Publik*, 10(1), 47-66. ISSN 1907-0489.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suryana, Y. (2019). Manajemen Strategis dalam Konteks Bisnis di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(3), 102-115.
- Tedeschi, J. T. (1973). *The Social Influence Processes*. Chicago: Aldine Publishing.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Waldo, D. (1948). *The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration*. Publisher.
- WCED (World Commission on Environment and Development). 1987. *Our Common Future*. Oxford University Press. New York.
- Wibowo. (2014). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Winardi, J. (2011). *Manajemen Konflik*. Jakarta: Penerbit Prenada Media Group.
- Wisnu, Dicky dan Siti Nurhasanah (2005), *Teori Organisasi : Struktur dan Desain*, Penerbit UMM Press
- Wursanto. 2002. *Dasar-Dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi
- Yulianti, A. (2017). Efektivitas Pelayanan Publik Pasca Pemekaran Kecamatan Samarinda Kota, di Kota Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 5(3), 6327-6339. ISSN 0000-0000. Diakses dari [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20\(08-01-17-05-19-35\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/08/JURNAL%20(08-01-17-05-19-35).pdf)
- Yulistira Sari, Setiawan, A., Marina, B. F., & Muktamar, A. (2024). Analisis Sinergis antara Perencanaan Manajemen Strategik dan Kepuasan Kerja dalam Mengoptimalkan Kinerja Organisasi. *Jurnal Manajemendan Kewirausahaan*, 1(3), 149
- Zeithaml, A., Berry, V. A., & Berry, L. L. (1988). Servqual: A Multiple Item Scale For Measuring Consumer Perceptions Of Service Quality. *Journal of Retailing*, Vol. 64, No. 1, pp. 12.